

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

_____. 2017. *Menguak Tabir Hukum*. Kencana. Jakarta.

Achmad Chulaemi. 1993. *Hukum Agraria (Perkembangan, Macam-macam Hak atas Tanah dan Pemindahannya)*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Achmad Rubaie. 2007. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Cetakan Pertama. Bayu Media Publishing. Malang.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2014. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*. Rajawali Pers. Jakarta.

_____. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Adrian Sutedi. 2008. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.

_____. dkk. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Andy Hartanto. 2015. *Panduan Lengkap Hukum Praktis: Kepemilikan Tanah*. Laksbang Justitia. Surabaya.

Budi Harsono. 1999. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.

Boedi Harsono. 2003. *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*. Universitas Trisakti. Jakarta.

_____. 2019. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Isi dan Pelaksanaannya*. Universitas Trisakti. Jakarta.



CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1986.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi kedua. Balai Pustaka. Jakarta.

Fanny Amelia Legianty dan Yunanto Irawati. 2019. *Perjanjian Jual Beli Tanah yang Melanggar Asas Nemo Plus Juris pada Pendaftaran Tanah*. Notarius. Volume 12 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Handri Rahardjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Pustaka Yustisia. Jakarta.

Hari Widiyanto dan Waluyo Sudarmaji. 2022. *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.

Herlien Budiono. 2011. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

I Gede Surata. 2022. *Penyebab Terjadinya Konflik Pertanahan*. Kertha Widya. Volume 10 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti. Bali

Indar. dkk. 2020. *Sengketa Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum. Pilihan Metode & Prktik Penulisan Artikel*. Edisi Revisi. Mirra Buana Media. Yogyakarta.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2010. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Rajawali. Jakarta.

_____. 2003. *Jual Beli*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

M. Yahya Harahap. 2022. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suhadi. 2020. *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Media Cipta Perkasa.



- Margono. 2019. *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Maskawati. 2019. *Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup*. Litera. Yogyakarta.
- Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak*. Mandar Maju. Bandung.
- Munir Fuadi. 2005. *Perbandingan Hukum Perdata*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Pranada Media Group. Jakarta.
- _____. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- R.Subekti.1995. *Aneka Perjanjian*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rusmadi Murad. 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Alumni.
- Salim H.S. 2003. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Setiono. 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret. Surakarta.
- Soedharyo soimin. 2004. *Status Hakn dan Pembebasan Tanah*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soemaryono dan Anna Erliyana. 1999. *Tuntunan Praktek Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT. Pramedya Pustaka.
- Sudikno Mertokusumo dan A.Plito. 2013. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Cetakan Ke-2.PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

_____. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta. hlm. 118-119.



Sufirman Rahman dan Ilham Abbas. 2023. *Hukum Dalam Jual Beli Tanah*. Aceh: CV. Sefa Media Utama.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Suyanto. 2019. *Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya.

Syahmin AK. 2005. *Hukum Kontrak Internasional*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Urip Santoso. 2005. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.

Widodo Dwi Putro, et.al. 2016. *Penjelasan Hukum : Pembeli Beritikad Baik Dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah*. Jakarta: Lelp.

Tugas Akhir (Tesis, Disertasi):

Aria Alfons. *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*. Ringkasan Disertasi Doktor. Universitas Brawijaya. Malang. 2010.

Chandara Ernaldo Palenewen. 2011. *Perbuatan Melawan Hukum Notaris dalam Akta Pengikatan Jual-Beli (APJB) dengan Blanko Kosong (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 211K/Pdt/2006)*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Toga Abdian Martiananda. 2015. "Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti (Analisis Terhadap Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997)". Tesis. Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.



Jurnal:

Adwin Tista. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Yang Mengalami Sengketa*. Lambung Mangkurat Law Journal. Volume 4 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin.

Agus Mardianto. "Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga". Jurnal Dinamika Hukum. Unsoed Purwokerto. Vol. 10 No. 1. 2010.

Ahmadi Miru. "Larangan Penggunaan Klausul Baku Tertentu Dalam Perjanjian Antara Konsumen dan Pelaku Usaha". Jurnal Hukum No. 17 Vol. 8. Juni 2001.

Andina Alfia Rizqi dan Yusriyadi. 2018. *Perlindungan Hukum Pemilik Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Hal Terjadi Kesalahan Data Penerbitannya (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kota Semarang)*. Notarius. Volume 11 Nomor 2. Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.

Anissa Aulia dan I Made Udiana. 2017. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sah Hak Atas Tanah Dengan Adanya Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum. Volume 5 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Bali.

Arief Budiman. 2020. Penyertifikatan Tanah Negara oleh Masyarakat Menjadi Tanah Hak Milik. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*. Volume 4 Nomor 2.

Arivan Amir. 2019. *Pengalihan Hak Penguasaan Tanah Menurut UUPA dalam Rangka Pendaftaran Tanah Pertama Kali*. Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan. Volume 8 Nomor 1. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Palembang.

Asta Setiawan, Sri Kistiyah, dan Rofiq Laksamana. 2021. *Problematika Keabsahan Jual Beli Tanah di Bawah Tangan Tanah di Kawasan Transmigrasi*. Jurnal Tunas Agraria. Volume 4 Nomor 1. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta

Chintya Agnisya Putri dan Gunarto. 2018. Efektivitas Pengecekan Sertifikat Terhadap Pencegahan Sengketa Tanah dalam Proses Peralihan Hak atas Tanah. *Jurnal AKTA*. Vol. 5. Nomor 1.

ezky Amanda Anastasia, Jonathan P A Tumanggor, dan Reni Rilyah. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Yang Status Kepemilikan Segelnya Telah Dilakukan Peralihan Kepada Orang Lain Tanpa Itikad Baik*. Jurnal Lex Suprema.



Volume 4 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Balikpapan. Balikpapan.

Devi Kumalasari dan Dwi Wachidiyah Ningsih. 2018. *Syarat Sahnya Perjanjian tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 ayat (2) K.U.H.Perdata*. Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik. Volume 7 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Gresik. Gresik.

Dian Ekawati, et al. 2021. *Prosedur Peralihan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia*. JAMAICA: Jurnal Abdi Masyarakat Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang. Volume 2 Nomor 2. Program Studi Teknik Informatika. Banten.

Fadhila Restyana Larasati dan Mochammad Bakri. 2018. *Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 pada pUtusan Hakim dalam Pemberian Perlindungan Hukum bagi Pembeli Beritikad Baik*. Jurnal Konstitusi. Volume 15 Nomor 4. Panitia dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta.

Gary Hadi. "Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa (Studi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Outlet Di Hermes Building Medan)". USU Law Journal Vol. 5. No.2. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2017. Medan.

Giovanni Rondonuwu. 2017. *Kepastian Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*. Lex Privatum. Volume V Nomor 4. Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

I Gusti Agung Putri Pradnyautari, I Nyoman Darmadha, dan I Wayan Novy Purwanto. 2020. *Kepastian Hukum Bagi Pihak Pemegang Sertipikat Hak Milik Berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) Pp Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum. Volume 8 Nomor 3. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Bali.

I Made Suwitra. 2014. *Penguasaan Hak Atas Tanah dan Masalahnya*. Jurnal IUS. Volume II Nomor 6. Fakultas Hukum Universitas Mataram. Mataram.

ari. 2020. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum* ana dan Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. ume 11 Nomor 11. Fakultas Hukum Universitas Dirgantara rsekal Suryadarma. Jakarta.



Iwan Permadi. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum*. Yustisia. Volume 5 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Kiki Rizki, et.al. 2020. *Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dengan Terbitnya Sertifikat Ganda Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*. Aktualitas: Jurnal Hukum. Volume 3 Nomor 1. UPT Publikasi Ilmiah Universitas Islam Bandung. Bandung.

Klaudius Ilkam Hulu. 2021. *Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Bukti Kepemilikan Hak*. Jurnal Panah Keadilan. Volume 1 Nomor 1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nias Raya. Nias Selatan.

Liliana Tedjosaputro. 2016. *Kajian Hukum Pemberian Kuasa sebagai Perbuatan Hukum Sepik dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan*. Jurnal Spektrum Hukum. Volume 13 Nomor 2. Program Magister Ilmu Hukum Untag. Semarang.

M Ghusni Ridho dan Arief Suyono. 2021. *Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pengemudi Ojek Online (Studi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019)*. Privat Law. Volume 9 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

M. Faisal Rahendra Lubis. 2021. *Perbuatan Melawan Hukum Menguasai Tanah Hak Milik Orang Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3302 K/Pdt/2018)*. Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat. Volume 20 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Medan.

Made Yudha Wismaya dan I Wayan Novy Purwanto. 2014. *Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mekanisme Mediasi*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum. Volume 2 Nomor 5. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Bali.

Masdari Tasmin. 2019. *Urgensi Alternative Dispute Resolution (ADR) di Negara Indonesia*. Jurnal WASAKA HUKUM. Volume 7 Nomor 2. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam. Banjarmasin.

Miftahul Arifin. "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian". Jurnal Ius Constituendum | Volume 5 Nomor 1 April 2020.



- Mohammad Jeffry Maulidi. “*Analisis Hukum Tentang Peralihan Hak Milik Atas Tanah Dengan Bukti Akta Di Bawah Tangan Sebagai Dasar Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali (Studi Di Kabupaten Lombok Tengah)*”. Jurnal IUS. Vol V. Nomor 3. Desember 2017.
- Mukti Fajar ND. Yati Nurhayati. dan Ifrani. “*Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia*”. Jurnal Hukum Ius Quia Lustum No. 2 Vol. 25 Mei 2018.
- Ni Kadek Ditha Angreni dan I Gusti Ngurah Wairocana. 2018. *Legalitas Jual Beli Tanah Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jurnal Kertha Semaya. Volume 6 Nomor 9. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Bali.
- Nia Kurniati dan Efa Laela Fakhriah. 2017. *BPN Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia Pasca Perkaban No. 11 Tahun 2016*. Sosiohumaniora. Volume 19 Nomor 2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Sumedang.
- Ni Nyoman Putri Satrianingsih dan A.A. Ngurah Wirasilah. 2019. *Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Perjanjian Jual Beli Dibawah Tangan*. Kertha Semaya. Volume 7 Nomor 6. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Bali.
- Noviansih Muharam. 2015. *Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah*. Pranata Hukum. Volume 10 Nomor 1. Universitas Bandar Lampung. Bandar Lampung.
- Pramudhita Kusuma Wardani, B.Rini Heryanti, dan Dharu Triasih. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Listrik Di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta Area Semarang Rayon Semarang Selatan Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Semarang Law Review. Volume 1 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Semarang. Semarang.
- Prihatin Yuniarlin. 2012. *Penerapan Unsur-Unsur perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia*. Jurnal Media Hukum. Volume 19 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.

Harriestha Martana. 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Ketentuan Pasal 32 Ayat (2) No. 24 Tahun 1997*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Volume 3 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Bali.



Roni, et al. 2023. *Sanksi Hukum Pelaku Menguasai Tanah Milik Orang Lain Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 PRT Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau kekuasaannya*. Consensus: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 1 Nomor 3. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA). Palembang.

Rusmin Nuryadin, Hirsanuddin, dan Sahnun. 2020. *Legalitas Jual Beli Hak Atas Tanah dalam Sengketa*. Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Volume 8 Nomor 2. Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Padang.

Sarah D.L. Roeroe. 2013. *Penegakan Hukum Agraria dan Penyelesaian Sengketa Pertahanan dalam Proses Peradilan*. Jurnal Hukum Unsrat. Volume 1 Nomor 6. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Manado.

Sri Redjeki Slamet. 2013. *Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi*, Lex Jurnalica. Volume 10 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Jakarta.

Syamsuddin Pasamai. 2017. *Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997*. Al Hikam. Volume 1 Nomor 4. STAI Ma`had Aly Al-Hikam Malang. Malang.

Tamami Dirga Jeis, Alpi Sahari, dan Ahmad Fauzi. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Ganda Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Pertanahan Nasional Dalam Objek Yang Sama (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1820 K/Pdt/2017)*. IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum. Volume 2 Nomor 1. Bunda Media Group. Deli Serdang.

Titin Apriani. 2021. *Konsep Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum dan wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya dalam KUHPerdara*. Jurnal Ganex Swara. Volume 15 Nomor 1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Mahasaraswati Denpasar PSDKU Mataram. Mataram.

Peraturan Perundang-Undangan:



Peraturan Wetboek.

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.



Putusan Pengadilan:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/SIP/1971/
Tanggal 9 Juli 1973.

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor
10/Pdt.G/2017/PN.BIK

Internet:

M Ivan Mahdi. Konflik Agraria Paling Banyak Terjadi di Sektor Perkebunan. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/konflik-agraria-paling-banyak-terjadi-di-sektor-perkebunan>. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2022. Pukul 07.00 WITA.

Putri Ayu Trisnawati (Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan). *Jenis-Jenis Peralihan Hak Atas Tanah*. <https://pdb-lawfirm.id/jenis-jenis-peralihan-hak-atas-tanah/>. Diakses pada tanggal 20 November. Pukul 20.00 WITA.

Yosep Peniel Batubara, 2021, Putusan NO (Niet Ontvanklijke Verklaard): Berbagai Macam Cacat Formil yang Melekat pada Gugatan, Jakarta, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diakses melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13958/Putusan-NO-Niet-Ontvankelijke-Verklaard-Berbagai-Macam-Cacat-Formil-yang-Melekat-pada-Gugatan.html> pada tanggal 20 Januari 2024.

